

**PERAN KECAMATAN BANTAR GEBANG DALAM Mendukung
KETAHANAN PANGAN BERAS Kota BEKASI**

Mochtar Cahyo Utomo
Lemhannas RI
Email: mcutomo@gmail.com

ABSTRACT

This paper explained the district's role to fulfilled the rice's need in the region. The quantitative data showed rice food resilience Bekasi and Bantargebang District had not yet fulfilled. The rice availability which came from the internal rice production source, Bekasi contribution (1.05%), and Bantargebang District (3.86%) was very low therefore the dependence on external rice production was very high (more than 96%) however the rice production source was only on the average Bekasi contribution (126.77%) and Bantargebang District (36.43%). However the distribution and access aspect of rice consumption had been well fulfilled. Bantargebang District's role as the district with the largest paddy field had not yet given a meaningful contribution to the Bekasi internal rice production.

Keywords: *District's Role, Rice Production, Food Resilience.*

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan seputar peran kecamatan dalam memenuhi kebutuhan beras di daerah. Dengan menggunakan data kuantitatif, tulisan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan beras Kota Bekasi dan Kecamatan Bantargebang belum terpenuhi. Ditemukan bahwa ketersediaan beras yang berasal dari sumber produksi beras internal, sumbangan Kota Bekasi (1,05%) dan Kecamatan Bantargebang (3,86%) sangat kecil sehingga ketergantungan terhadap sumber produksi beras eksternal sangat tinggi (lebih dari 96%), sementara sumber produksi beras eksternal hanya berupa rata-rata sumbangan Kota Bekasi (126,77%) dan Kecamatan Bantargebang (36,43%). Sementara itu, untuk aspek distribusi dan akses serta konsumsi beras sudah terpenuhi dengan baik. Peran Kecamatan Bantargebang sebagai kecamatan dengan areal persawahan terluas ternyata belum mampu memberikan kontribusi berarti bagi produksi beras internal Kota Bekasi.

Kata Kunci: *Peran Kecamatan, Produksi Beras, Ketahanan Pangan.*

PENGANTAR

Pembukaan UUD NRI 1945 alenia 4 (empat) mencantumkan tujuan nasional bangsa Indonesia, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kemudian dalam batang tubuh UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan

penghidupan yang layak dan kemakmuran. Dalam upaya mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, pemerintah berusaha mewujudkannya melalui program-program kerja yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional. Salah satu sasaran pokok dalam RPJP nasional adalah terwujud-

nya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang ditandai dengan kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

Kemandirian pangan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Dalam upaya mempertahankan kemandirian pangan pada tingkat aman, diperlukan sistem ketahanan pangan yang diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal (UU No. 17/2007)

Pangan sebagai salah satu elemen dari tiga kebutuhan primer (dasar) manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sebagai komponen dari kebutuhan dasar manusia, maka pangan merupakan masalah utama yang strategis bagi kehidupan bangsa (SEAFAST. 2010). Oleh karena itu, negara mengatur secara spesifik masalah pangan ini dalam UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan, yang kemudian diperbaharui melalui UU No. 18 tahun 2012 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pengertian ketahanan pangan menurut UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin

dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. (UU No 18/2012)

Aturan pelaksanaan ketahanan pangan kemudian dituangkan dalam PP No. 68 tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dan kemudian sebagai pelaksanaannya dibentuklah Dewan Ketahanan Pangan melalui Perpres No. 83 tahun 2006.

Beras sebagai salah satu bahan pangan merupakan makanan pokok bagi 98 persen penduduk Indonesia (Riyadi.2002 dalam Kusumaningrum. 2008:1). Beras juga termasuk dalam komponen sembilan bahan pokok yang fluktuasi harganya dapat mempengaruhi nilai inflasi negara kita. Oleh karena itu, stabilitas harga beras sangatlah diperlukan untuk menekan angka inflasi. Stabilitas harga beras ini akan terwujud apabila ketahanan pangan tercapai.

Guna mewujudkan ketahanan pangan nasional terutama beras harus dipahami dari tiga aspek. Aspek-aspek tersebut adalah ketersediaan distribusi dan akses, dan konsumsi. Ketiga aspek tersebut di atas saling berkaitan satu sama lain (Bappenas, 2011).

Bekasi telah ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional dalam Perpres No. 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang Bekasi, Puncak, Dan Cianjur. Sebagai kawasan strategis nasional, tentu saja penataan ruang Kota Bekasi menjadi prioritas, tetapi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun

2011-2031 sama sekali tidak menyinggung/mengatur masalah penataan areal pertanian.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi melalui publikasinya memberikan data mengenai luas areal persawahan yang dimiliki oleh Kota Bekasi seluas 505 Ha dengan Kecamatan Bantargebang sebagai kecamatan yang memiliki areal persawahan terluas dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Bekasi (Bappeda. 2011:166).

Potensi inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pangan terutama beras bagi masyarakat Kota Bekasi. Kenyataannya, produksi padi sebagai tanaman penghasil beras di Kota Bekasi dari tahun ketahun semakin menurun. Nilai penurunan produksi padi adalah sebesar 4.96% tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh menyempitnya areal persawahan yang tergeser oleh permukiman dan industri dari tahun ke tahun sehingga kemudian hanya menyisakan 2.40% atau sebesar 505 Ha dari 21.049 Ha keseluruhan luas Kota Bekasi pada tahun 2011 (BPS, 2010)

PEMBAHASAN

Profil Dan Wilayah Administratif

Pertama, kota Bekasi, Kota Bekasi atau yang lebih dikenal dengan Kota Patriot merupakan kota bersejarah. Penyair Khairil Anwar mengabadikan nama Bekasi dalam puisinya berjudul “Kerawang – Bekasi”. Dalam puisinya yang terkenal itu. Khairil Anwar menggambarkan suasana Kota Bekasi pada masa perjuangan kemerdekaan waktu itu. Sebagai bagian dari Batavia. Bekasi tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Hal itu bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan bersejarah seperti kantor walikota lama,

stasiun, dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya.

Kota Bekasi mempunyai lambang kota yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 1 tahun 1998 tentang Lambang Kota Bekasi, Motto “Kota Patriot” mempunyai arti semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa. Dalam lambang itu terdapat 8 buahbuahan yang terikat dengan padi yang bulirnya berjumlah 50, yang terdiri dari 7 buah berukuran besar dan 1 buah berukuran kecil, melambangkan jumlah kecamatan dan kelurahan pada waktu Bekasi menjadi kota administratif. Secara geografis, posisi Kota Bekasi berada pada posisi latitude 106°55" bujur timur dan 6°7" 6°15" lintang selatan, dengan ketinggian (altitude) antara 11 81 meter di atas permukaan laut, dan kemiringan antara 0 – 2% (Bappeda. 2011:11). Melihat posisi Kota Bekasi yang sangat strategis dan dekat dengan ibukota memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kota Bekasi terutama dalam bidang komunikasi dan perhubungan.

Kota Bekasi memiliki luas wilayah seluas 210.49 km² dan berbatasan langsung dengan: sebelah utara, Kabupaten Bekasi; sebelah selatan, Kabupaten Bogor; sebelah barat, Kota Jakarta Timur; dan sebelah timur, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi dibagi menjadi 12 kecamatan yang masing-masing dikepalai oleh seorang camat, dan 56 kelurahan yang masing-masing dikepalai oleh seorang lurah.

Kedua, kecamatan Bantargebang. Kecamatan Bantargebang sebelum menjadi wilayah administratif Kota Bekasi, dahulunya merupakan bagian dari kabupaten Bekasi.

Semenjak Bekasi berubah status menjadi kotamadya berdasarkan UU No. 9 tahun 1996. Kecamatan Bantargebang menjadi bagian wilayah administratif Kota Bekasi.

Pada awal pembentukan Kotamadya Bekasi, wilayah Kecamatan Bantargebang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Kecamatan Mustikajaya dan Kecamatan Bantargebang sendiri. Namun, berdasarkan Perda Kota Bekasi No.4 tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Bantargebang mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Mustikajaya dan Kecamatan Bantargebang.

Kecamatan Bantargebang terletak di bagian selatan Kota Bekasi, dengan luas wilayah 1.704 Ha. Berdasarkan pembentukannya, batas wilayah administratif Kecamatan Bantargebang adalah sebagai berikut: sebelah Selatan, Kabupaten Bogor; sebelah barat, Kabupaten Bogor; sebelah utara, Kecamatan Mustikajaya dan Kecamatan Rawalumbu; dan sebelah timur, Kabupaten Bogor dan Kecamatan Mustikajaya.

Setelah dimekarkan menjadi Kecamatan Mustikajaya dan Kecamatan Bantargebang, kecamatan ini dibagi menjadi 4 kelurahan, yang masing-masing dikepalai oleh seorang lurah; 33 rukun warga, yang masing-masing dikepalai oleh seorang ketua RW; dan 151 rukun tetangga, yang masing-masing dikepalai oleh seorang ketua RT.

Tata Guna Lahan

Kota Bekasi dalam perkembangannya merupakan kota yang cukup padat. Sebagai kawasan strategis nasional. Kota Bekasi memerlukan penanganan yang sangat serius dalam tata ruang maupun

penggunaan lahan. Dalam Perda Kota Bekasi No. 13 tahun 2011 tentang RT/RW Kota Bekasi Tahun 2011-2031 Pasal 2 dikemukakan tujuan dari dilaksanakannya RTRW Kota Bekasi serta prioritas dari penataan ruang dan wilayah Kota Bekasi. Namun, dari 14 prioritas RTRW Kota Bekasi, tidak ada satupun yang langsung berkaitan dengan penataan ruang bagi lahan pertanian. Hal ini sangat disayangkan karena Kota Bekasi memiliki luas areal persawahan seluas 505 Ha. Potensi ini apabila tidak dioptimalkan pemanfaatannya akan menimbulkan akibat beralihnya fungsi lahan tersebut menjadi lahan-lahan dengan peruntukan yang sejalan dengan RTRW Kota Bekasi. Berdasarkan data Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi tahun 2010, penggunaan lahan adalah sebagai berikut: luas sawah, 505 Ha; luas tanah pekarangan untuk bangunan dan halaman, 14.915 Ha; luas tegalan, kebun, ladang, dan huma. 4.285 Ha; luas kolam, tebat, dan empang. 69 Ha; dan luas lainnya. 1.275 Ha. Sementara itu, penggunaan lahan di Kecamatan Bantargebang berdasar data tahun 2010 adalah sebagai berikut: luas sawah. 11 Ha; luas pekarangan dan perumahan. 644.45 Ha; luas kuburan. 4.8 Ha; dan luas lainnya. 534.812 Ha.

Kondisi Ketahanan Pangan Beras

Dalam upaya mensukseskan ketahanan pangan daerah. (Pemkot, 2011) Pemerintah Kota Bekasi dalam peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 49 tahun 2008 tentang Tugas. Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, membentuk bagian bina ketahanan pangan yang berada di bawah naungan Sekretariat Daerah melalui Asisten II Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Tabel 1
Ketersediaan Beras Kota Bekasi terhadap Kebutuhan Beras Kota Bekasi (Tua)

Uraian	2010	2011	201 5	2020	Raata-rata
Produksi Beras Kota Bekasi	3.968,17	3.733,53	3.046,11	2.361,99	3.393,64
Pasokan Beras Eksternal Kota Bekasi	88.979,28	116.556,39	343.329,57	1.324.748,82	468.406,02
Ketersediaan Beras	92.947,45	120.299,92	346.375,68	1.327.110,81	471.799,66
Kebutuhan Beras Kota Bekasi	280.705,8	287.484,9	398.222,02	598.429,58	369.481,20
Selisih pasokan beras Kota Bekasi Terhadap Kebutuhan	187.758,25	-167.184,98	-51.846,34	728.681,25	102.318,46

Tabel2
Ketersediaan Beras Kecamatan Bantargebang terhadap Kebutuhan Beras Kecamatan Bantargebang Tahun 2011 (Ton)

Uraian	Jumlah
Pasokan beras internal Kecamatan Bantargebang	615,2
Pasokan eksternal Kecamatan Bantargebang**	4.344
Total pasokan beras Kecamatan Bantargebang	4.959,2
Kebutuhan beras Kecamatan Bantargebang*	11.925,1
Kekurangan pasokan beras Kecamatan Bantargebang terhadap kebutuhan	6.965,9

Hasil analisis tentang produksi beras internal dan eksternal Kota Bekasi dan Kecamatan Bantargebang memberikan gambaran bahwa kedua sumber produksi beras tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan beras penduduk Kota Bekasi dan Kecamatan Bantargebang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data bahwa rata-rata ketersediaan beras Kota Bekasi hingga tahun 2020 yang akan datang sebesar 471.799.66 ton, ini berasal dari rata-rata produksi beras internal sebesar 3.393.64 ton (0,72%) dan rata-rata pasokan beras eksternal sebesar 468.406.02 ton (99,28%). Sementara untuk perbandingan rata-rata ketersediaan beras terhadap kebutuhan beras Kota Bekasi hingga tahun 2020 yang akan datang mengalami surplus sebesar 102.318.46 ton (27.69%). Selanjutnya, ketersediaan beras Kecamatan Bantargebang tahun 2011 dapat dirangkum dalam tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data bahwa pasokan beras Kecamatan Bantargebang terhadap kebutuhan beras Kecamatan Bantargebang tahun 2011 mengalami kekurangan sebesar 6.965.9 ton (58,41%).

Berdasar kedua tabel 1 dan 2 tersebut dapat diperoleh data bahwa ketersediaan beras Kota Bekasi maupun Kecamatan Bantargebang tidak mampu memenuhi kebutuhan beras penduduknya. Hal ini menyebabkan kondisi ketahanan beras Kota Bekasi dan Kecamatan Bantargebang tidak terpenuhi.

Sumbangan Produksi Beras

Sumbangan Kecamatan Bantargebang sebagai kecamatan dengan luas areal persawahan terbesar juga tidak banyak membantu upaya Kota Bekasi untuk memenuhi kebutuhan beras penduduknya dari sumber produksi internal dan bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan beras penduduk Kecamatan Bantargebang sendiri. Hal ini disebabkan oleh penyempitan lahan sawah yang mencapai 14.92% tiap tahunnya. ditambah pula dengan tidak adanya dukungan terhadap sector pertanian dalam RT/RW Kota Bekasi. Sumbangan Kecamatan Bantargebang terhadap Kota Bekasi dalam aspek ketersediaan beras adalah sebagai berikut: sumber produksi internal menyumbang sebesar 0,13%. sumber produksi eksternal

menyumbang sebesar 1,51%. dan ketersediaan pangan menyumbang sebesar 1,73%.

Distribusi Dan Akses Beras

Pada aspek distribusi dan akses sarana dan prasarana pendukung di Kota Bekasi sudah sangat mendukung berdasarkan data infrastruktur jalan, sarana transportasi, keberadaan pasar dan harga beras. Infrastruktur jalan Kota Bekasi diproyeksikan akan terus bertambah hingga tahun 2020. Hal yang perlu diantisipasi adalah trend naiknya harga beras yang diproyeksikan akan terus naik sampai tahun 2020 nanti. Keberadaan pasar dan sarana transportasi juga sangat memadai, sehingga mampu mendukung kelancaran distribusi dan akses beras masyarakat Kota Bekasi.

Sumbangan Kecamatan Bantargebang terhadap aspek distribusi dan akses beras masih sangat kecil dan dapat diuraikan sebagai berikut: infrastruktur jalan menyumbang sebesar 8,94%, sarana transportasi menyumbang sebesar 5,57%, keberadaan pasar menyumbang sebesar 15,47%, dan harga beras menyumbang kenaikan sebesar 2,30%. Rata-rata sumbangan Kecamatan Bantargebang terhadap Kota Bekasi dalam keempat aspek tersebut adalah sebesar 8.07%.

Konsumsi Beras

Pada aspek konsumsi beras baik di Kota Bekasi maupun Kecamatan Bantargebang

dapat dilihat dari masing-masing indikator berikut ini.

Pertama, tingkat konsumsi beras. Dengan peningkatan kebutuhan beras penduduk sebesar 8.47 % setiap tahunnya dan kebutuhan beras rata-rata sebesar 121.23 kg/tahun. maka kebutuhan beras per kapita penduduk Kota Bekasi dan Kecamatan Bantargebang dan sumbangan kebutuhan beras Kecamatan Bantargebang terhadap Kota Bekasi sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 3. Dari tabel tersebut diperoleh data bahwa sumbangan rata-rata kebutuhan beras per kapita penduduk Kecamatan Bantargebang terhadap Kota Bekasi diproyeksikan cenderung tetap hingga tahun 2020 yang akan datang dengan rata-rata kebutuhan beras sebesar 4.20%.

Kedua, tingkat pendapatan atau daya beli. Dengan pendapatan perkapita di tahun 2011 sebesar Rp. 16.727.244.-. mempunyai arti bahwa masyarakat Kota Bekasi hanya menghabiskan 5.37% dari pendapatannya untuk membeli beras. Dari analisis ini didapatkan bahwa kemampuan/daya beli masyarakat kota Bekasi terhadap beras masih relatif tinggi.

Dari analisis di atas, aspek konsumsi beras Kota Bekasi yang diperoleh berdasarkan data tingkat konsumsi beras dan pendapatan/ daya beli dapat terpenuhi. Tingkat konsumsi beras Kota Bekasi diproyeksikan akan terus

Tabel 3
Perbandingan Kebutuhan Beras Penduduk Kota Bekasi dan Kecamatan Bantargebang per Kapita(Ton)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2015	2020	Rata-Rata
Kebutuhan beras penduduk Kota Bekasi	225.155,4	282.563,7	280.705.8	287.484.9	398.222,02	598.429,58	345.426,90
Kebutuhan beras penduduk Kecamatan Bantargebang	9.471	12.494,2	11,528,3	11.925,1	16.518,6	24,823,3	14,460,08
Sumbangan kebutuhan beras per kapita penduduk Kecamatan Bantargebang terhadap Kota Bekasi	4,21%	4,42%	4,11%	4,15%	4,15%	4,15%	4,20%

naik hingga tahun 2020, namun hal ini diimbangi pula dengan tingkat pendapatan/ daya beli masyarakat Kota Bekasi yang juga diproyeksikan naik.

Peran Produksi Beras Kecamatan

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Bekasi, kebutuhan beras penduduk diproyeksikan juga akan terus meningkat sampai dengan tahun 2020 nanti. Hal ini perlu diantisipasi dengan tetap menjaga ketersediaan beras sehingga mampu untuk terus memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Berdasarkan analisis dan proyeksi di atas kondisi ketersediaan beras dan pemenuhan kebutuhan beras Kota Bekasi dapat dilihat dalam tabel 4.

Kondisi tersebut juga berlaku pada Kecamatan Bantargebang. Produksi beras

internal Kecamatan Bantargebang tidak mampu memenuhi kebutuhan beras penduduknya. Dari semua analisis di atas dapat dirangkum dalam sebuah tabel profil kebutuhan beras Kota Bekasi dan Kecamatan Bantargebang serta peran Kecamatan Bantargebang dalam memenuhi kebutuhan pangan Kota Bekasi, sebagaimana digambarkan dalam tabel 5 (lihat lampiran). Dari tabel tersebut diperoleh data bahwa produksi padi internal Kecamatan Bantargebang diprediksikan sampai tahun 2020 akan memberikan sumbangan yang sangat kecil dan semakin menurun padahal Kecamatan Bantargebang merupakan kecamatan terluas areal persawahannya. Kondisi ini menyebabkan Kota Bekasi akan sangat sulit mewujudkan kemandirian pangan wilayah dan ketergantungan terhadap sumber produksi beras eksternal sangat besar sekali. Akan tetapi dalam

Tabel 4
Kondisi Ketersediaan Beras dari Produksi Internal terhadap Kebutuhan Beras Kota Bekasi

Uraian	2010	2011	2015	2020
Jumlah penduduk (jiwa)	2.336.489	2.447.930	3.705.031	6.219.907
Kebutuhan beras penduduk perkapita(kg;/tahun)	120,14	117,44	107,48	96,21
Total Kebutuhan Beras (Ton)	280.705,8	287.484,9	398.222,02	598.429,58
Produk beras internal(Ton)	3.968,17	3.733,53	3.046,11	2.361,99
Sumbangan produksiberas internal terhadap kebutuhan beras(%)	1,41	1,30	0,76	0,39

Tabel 5
Profil Kebutuhan Beras Kota Bekasi dan Kecamatan Bantargebang serta Peran Kecamatan Bantargebang dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Kota Bekasi

Uraian	2010	2013	2015	2020
Jumlah penduduk Kota Bekasi (jiwa)	2.336.489	2.422.922	2.747.471	3.214.956
Jumlah Kebutuhan beras Kota Bekasi (Ton)	280.705,8	287.484,9	398.222,02	598.429,58
Produksiberas internal Kota Bekasi (Ton)	3.968,17	3.733,53	3.046,11	2.361,99
Presentase produksiberas eksternal terhadap kebutuhan	1,41	1,30	0,76	0,39
Presentase produksiberas eksternal terhadap kebutuhan	31,70	40,55	86,22	221,37
Jumlah penduduk Kecamatan Bantargebang (jiwa)	95.957	101.542	150.852	247.419
Jumlah kebutuhan beras Kecamatan Bantargebang (Ton)	698,3	615,2	276,5	139,7
Presentase produksiberas internal terhadap kebutuhan	6,06	5,16	1,67	0,50
Presentase produksiberas eksternal terhadap kebutuhan	26,00 [^]	36,43%	77,45 [^]	198,83 [^]
Sumbangan/peran jumlah penduduk Kecamatan Bantargebang terhadap Kota Bekasi (%)	4,11	4,15	4,07	3,98
Sumbangan/peran produksi beras internal Kecamatan Bantargebang terhadap kebutuhan beras Kota Bekasi (%)	0,25	0,21	0,07	0,02

[^]asumsi kenaikan produksi beras eksternal Kota Bekasi 31% pertahun.

hal kependudukan Kecamatan Bantargebang, walaupun diperkirakan jumlah penduduk dan kebutuhan beras akan terus meningkat. Sumbangan Kecamatan Bantargebang dalam hal kependudukan dan kebutuhan beras terhadap Kota Bekasi sangat kecil sekali.

SIMPULAN

Kondisi ketahanan pangan beras Kota Bekasi dalam tiga aspek ketahanan pangan beras dapat disimpulkan; (1) Aspek ketersediaan beras. Dapat dikatakan tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh sumber produksi beras internal yang hanya mampu menyumbang rata-rata sebesar 1.05% terhadap kebutuhan beras, oleh karena itu ketergantungan Kota Bekasi terhadap sumber produksi beras eksternal sangat tinggi (98.95%). Sementara itu, sumber produksi eksternal pada awalnya tidak mampu memenuhi kebutuhan beras penduduk Kota Bekasi, namun hasil proyeksi pada tahun 2020 yang akan datang sudah mampu memenuhi kebutuhan beras bahkan akan mengalami surplus, untuk rata-rata sumbangannya terhadap kebutuhan beras adalah sebesar 126.77% terhadap kebutuhan beras penduduk Kota Bekasi. (2) Aspek distribusi dan akses beras. Dapat dikatakan terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan adanya infrastruktur jalan yang beras (eks dolog. pandanwangi IR64. dan Cianjur) berkisar Rp. 7.400. dan kenaikannya sebesar 7.99% tiap tahunnya. (3) Aspek konsumsi beras. Dapat dikatakan terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan beras rata-rata Kota Bekasi sebesar 121.23 kg/tahun. peningkatan kebutuhan beras penduduk sebesar 8.47% setiap tahun yang masih relatif kecil, dan masyarakat Kota Bekasi hanya menghabiskan 5.37% dari pendapatannya untuk membeli beras. Dari ketiga aspek tersebut. hanya aspek

ketersediaan beras saja yang tidak terpenuhi oleh Kota Bekasi sementara dua aspek yang lain telah terpenuhi.

Kondisi ketahanan pangan beras Kecamatan Bantargebang dalam tiga aspek ketahanan pangan beras dapat disimpulkan: 1) Aspek ketersediaan beras. Dapat dikatakan tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh sumber produksi beras internal yang hanya mampu menyumbang rata-rata sebesar 3.86% terhadap kebutuhan beras, oleh karena itu ketergantungan Kecamatan Bantargebang terhadap sumber produksi beras eksternal sangat tinggi. Sementara itu, sumber produksi eksternal juga tidak mampu memenuhi kebutuhan beras penduduk Kecamatan Bantargebang, hanya mampu menyumbang sebesar 36.43% dan mengalami kekurangan sebesar 63.57% terhadap kebutuhan beras penduduk Kecamatan Bantargebang. 2) Aspek distribusi dan akses beras.

Dapat dikatakan terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan adanya infrastruktur jalan yang mencapai 108.59 km. sarana angkutan umum berjumlah 250 unit, terdapat satu unit pasar tradisional dan 18 unit swalayan kecil, serta harga rata-rata beras di Kecamatan Bantargebang sebesar Rp. 7,670,-. 3) Aspek konsumsi beras. Dapat dikatakan terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan beras rata-rata Kecamatan Bantargebang sebesar 121.23 kg/tahun, peningkatan kebutuhan beras penduduk sebesar 8.47% setiap tahun yang masih relatif kecil, dan masyarakat Kecamatan Bantargebang hanya menghabiskan 5.37% dari pendapatannya untuk membeli beras. Dari ketiga aspek tersebut, hanya aspek ketersediaan beras saja yang tidak terpenuhi oleh Kecamatan Bantargebang sementara dua aspek yang lain telah terpenuhi.

Peran Kecamatan Bantargebang dalam mendukung ketahanan pangan beras Kota Bekasi dapat dilihat dari seberapa besar sumbangan yang mampu diberikan oleh Kecamatan Bantargebang dalam ketiga aspek ketahanan pangan beras: (1) Aspek ketersediaan beras. Sumbangan Kecamatan Bantargebang terhadap Kota Bekasi dalam aspek ketersediaan beras adalah sebagai berikut: (a) sumber produksi internal menyumbang sebesar 0,13%. b) sumber produksi eksternal menyumbang sebesar 1,51%. dan (c) ketersediaan pangan menyumbang sebesar 1,73%. (2) Aspek distribusi dan akses beras. Sumbangan Kecamatan Bantargebang terhadap aspek distribusi dan akses beras masih sangat kecil: (a) infrastruktur jalan menyumbang sebesar 8,94%. (b) sarana transportasi menyumbang sebesar 5,57%. (c) keberadaan pasar menyumbang sebesar 15,47%. dan (d) harga beras menyumbang kenaikan sebesar 2,30%. Rata-rata sumbangan Kecamatan Bantargebang terhadap Kota Bekasi dalam keempat aspek tersebut adalah sebesar 8,07%. (3) Aspek konsumsi beras. Sumbangan rata-rata kebutuhan beras per kapita penduduk Kecamatan Bantargebang terhadap Kota Bekasi sangat besar, dibuktikan dengan sumbangan konsumsi rata-rata beras penduduk perkapita Kecamatan Bantargebang terhadap Kota Bekasi yang relatif kecil hanya sebesar 4,20% saja. Dari ketiga aspek di atas, hanya aspek konsumsi beras saja yang mampu memberikan sumbangan yang besar bagi ketahanan pangan beras Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan beras Kota Bekasi disarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) Diperlukan suatu kebijakan untuk mencegah alih fungsi lahan Kota Bekasi mengingat pemenuhan pasokan beras yang

sangat minim dari sumber produksi internal. (2) Rencana tata ruang wilayah Kota Bekasi yang lebih mendukung pemanfaatan lahan untuk pertanian. (3) Ketergantungan terhadap pasokan beras dari sumber produksi eksternal harus didukung dengan kestabilan harga beras di pasaran, untuk itu diperlukan suatu upaya dan strategi yang tepat dalam menjaga kestabilan harga beras. 4) Pemanfaatan lahan tidur (lahan yang pemanfaatannya tidak jelas) yang luasnya mencapai sebesar 5.44% dari keseluruhan luas wilayah Kota Bekasi untuk lahan pertanian dalam upaya meningkatkan produksi beras internal.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan beras Kecamatan Bantargebang disarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) Meningkatkan usaha-usaha peningkatan produktifitas padi di Kecamatan Bantargebang mengingat potensi persawahan yang masih sangat besar. (2) Memberikan stimulan-stimulan agar masyarakat Kecamatan Bantar gebang yang beralih profesi dari petani/penggarap menjadi pemulung/pengumpul barang bekas untuk kembali pada profesi semula sehingga produktifitas beras dapat ditingkatkan. (3) Untuk meningkatkan peran Kecamatan Bantargebang dalam mendukung ketahanan pangan beras Kota Bekasi disarankan beberapa hal sebagai berikut: (a) mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian Kota Bekasi dengan mengadakan program sekolah lapangan bagi para petani Kecamatan Bantargebang dengan sampel sawah seluas 5 hektar dan telah terbukti mampu meningkatkan produktifitas padi hingga 7 ton perhektar. (b) meningkatkan produksi internal beras dengan cara meningkatkan produksi beras lokal, mengantisipasi dan memanfaatkan perubahan iklim/cuaca, serta melakukan

pengembangan varietas baru.(c) perbaikan dan penambahan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA. 2011. *Kota Bekasi dalam Angka 2011*. Bekasi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
- BAPPENAS, 2011. Penjelasan Tentang Ketahanan Pangan (internet), <www.bappenas.go.id/get-file-server/node/10492/>(diakses 29 Mei 2012).
- BPS. 2010. Kecamatan Bantargebang dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.
- Kusumaningrum. R. 2008. *Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah Terhadap Permintaan Dan Penawaran*

Beras di Indonesia. Tesis: Institut Pertanian Bogor.

- Pemerintah Kota Bekasi. 2011 *Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Kota Bekasi. 2011*. Pemerintah Kota Bekasi: Bekasi
- SEAFASST. 2010. Ketahanan Pangan dan Perspektif Kebijakannya). <<http://seafast.ipb.ac.id/partnership/124ketahanan-pangan-dan-perspektifkebijakannya/>> (diakses 29 Mei 2012).

Undang-Undang& Peraturan

Pemerintah:

- Undang-Undang& Peraturan Pemerintah UU No 17 Th 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- UU no 18 Tahun 2012 tentang pangan.
- PP tahun 2012 Ketahanan Pangan,